

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEGAL

Jl. Cut Nyak Dhien, Slawi – Kab. Tegal
Telp. (0283) 6197673 – Fax. (0283) 6197503

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Sumber Daya Manusia	1
1.3. Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	5
1.4. Landasan Hukum	5
1.5. Sistematika	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Indikator Kinerja	12
2.3. Perjanjian Kinerja	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2. Analisis Capaian Kinerja	15
3.3. Realisasi Anggaran	25
3.4. Narasi LKjIP	29
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	29
4.2. Rekomendasi	29
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	
RKT/Lain-lain yang dianggap perlu	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	11
Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal Tahun 2022	12
Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal	13
Tabel 2.4 : Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal	14
Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja	15
Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal	16
Tabel 3.3 : Perbandingan Realisasi Kinerja dalam 3 (tiga) tahun terakhir	17
Tabel 3.4 : Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal pada tahun 2022	19
Tabel 3.5 : Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal pada tahun 2022	20
Tabel 3.6 : Perkembangan Kondisi Drainase, Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal tahun 2022	21
Tabel 3.7 : Analisis Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal tahun 2022	22
Tabel 3.8 : Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal pada tahun 2022	23
Tabel 3.9 : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal	25

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal	4
--	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNYA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tegal, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

LKjIP ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 sebagai media akuntabilitas (Peraturan IKU Instansi).

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat epektifitas dan efisiensi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2019 – 2024 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Slawi, 01 Februari 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN TEGAL

DINAS PUGR

IR. HERY SUHARTONO, MM
NIP. 19630615 199401 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal menyusun Laporan Kinerja/LAKIP tahun 2022 Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

1.2. Struktur Organisasi, Tata Kerja & Sumber Daya Manusia

a. Gambaran umum organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum meliputi Bina Marga dan Sumber Daya Air. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bidang Jalan dan Bidang Jembatan, Bidang Sumber Daya Air, Bidang PBL-Taru serta pembinaan Jasa konstruksi;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Bidang - bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bidang Jalan dan Bidang Jembatan, Bidang Sumber Daya Air, Bidang PBL-Taru serta pembinaan Jasa Konstruksi;

- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pekerjaan Umum meliputi Bidang Jalan dan Bidang Jembatan, Bidang Sumber Daya Air, Bidang PBL-Taru serta pembinaan Jasa Konstruksi;
- 4) Pembinaan terhadap UPTD di bidang pekerjaan umum yang meliputi bidang jalan dan bidang jembatan, bidang sumber daya air serta pembinaan jasa konstruksi;
- 5) Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bidang Jalan dan Bidang Jembatan, Bidang Sumber Daya Air, Bidang PBL-Taru serta pembinaan Jasa Konstruksi;

b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Subbagian Keuangan;
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c) Kelompok Unsur Perencanaan
- 3) Bidang, terdiri dari :
 - a) Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri atas:
 1. Kelompok Unsur Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
 2. Kelompok Unsur Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 3. Kelompok Unsur Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - b) Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:
 1. Kelompok Unsur Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
 2. Kelompok Unsur Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air;
 3. Kelompok Unsur Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 - c) Bidang Jasa Konstruksi, terdiri atas:
 1. Kelompok Unsur Pembinaan Jasa Konstruksi;
 2. Kelompok Unsur Bina Teknik, Pendataan, dan Informasi Jasa Konstruksi;
 3. Kelompok Unsur Manajemen Konstruksi dan Pengawasan Jasa Konstruksi.



d) Bidang Penataan Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang, terdiri atas:

1. Kelompok Unsur Penataan Bangunan;
2. Kelompok Unsur Penataan Lingkungan; dan
3. Kelompok Unsur Penataan Ruang.

e) UPTD yang terdiri dari :

1. UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah, terdiri dari :

- 1.1. UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah I;
- 1.2. UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah II;
- 1.3. UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah III;
- 1.4. UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah IV;
- 1.5. UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah V;
- 1.6. UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah VI;

Struktur Organisasi UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah terdiri dari :

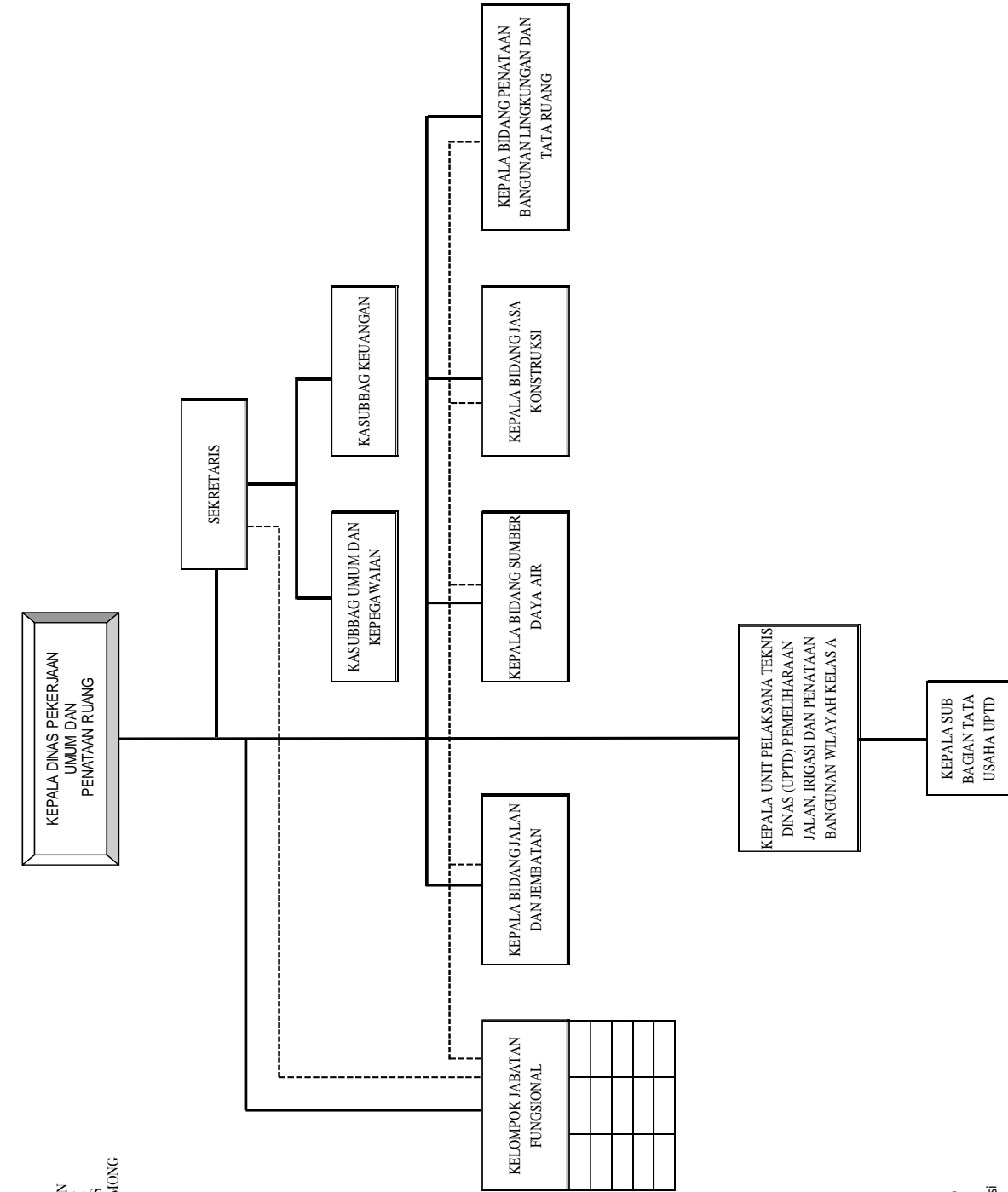
- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD.

a) Kelompok Jabatan Fungsional ;

1) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal tahun 2022

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal Tahun 2022



LAMPIRAN IIB
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS- DINAS
DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN TEGAL

KETERANGAN:

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

c. Sumber Daya Manusia

Pegawai dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan tahun 2022 berjumlah 479 orang terdiri dari 176 Pegawai Negeri Sipil (162 laki-laki dan 14 perempuan), 5 Pegawai Tidak Tetap (4 laki-laki dan 1 perempuan) dan 298 Pegawai Harian Lepas (257 laki-laki dan 41 perempuan). Jumlah pejabat struktural sebanyak 14 orang terdiri dari laki-laki. Jumlah pejabat struktural tersebut meliputi 1 orang pejabat eselon IV.c, 1 orang pejabat eselon IV.b, 6 orang pejabat eselon IV.a, 5 orang pejabat eselon III.d, dan 1 orang pejabat eselon III.c.

3.1. Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Beberapa isu – isu strategis atau permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan;
- b. Belum optimalnya kondisi dan kualitas jembatan yang memenuhi standar teknis;
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan penyediaan jaringan irigasi;
- d. Belum terwujudnya pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi.

3.2. Landasan Hukum

a. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024;
- 10) Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tegal;
- 11) Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

b. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tegal disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).



c. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan
- 2) Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- 3) Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- 4) Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

3.3. Sistematika

Penulisan LkjIP Kabupaten Tegal Tahun 2022 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran, capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja

- sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- b. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
 - c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
 - d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 - e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
 - f. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa yang akan datang yang akan dilakukan meningkatkan kinerja.

Lampiran-lampiran, yang terdiri atas :

- Lampiran I : Dokumen PK (Perjanjian Kinerja Tahun 2022)
- Lampiran II : IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal Tahun 2022
- Lampiran III : Lampiran-lampiran lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

a. Visi

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, telah ditetapkan visi dan misi pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Pembangunan Nasional. Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal haruslah searah dengan visi dan misi Kabupaten Tegal.

Visi Kabupaten Tegal :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”

Visi Kabupaten Tegal tersebut, merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tegal dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- **Sejahtera**, Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.
- **Mandiri**, Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan memantapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri.
- **Unggul**, Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.
- **Berbudaya**, Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai-nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal.
- **Berakhlak mulia**, Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam

perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

b. Misi

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah Misi untuk **mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
- 2) Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
- 3) Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5) Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal pada misi kedua yaitu ***"Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan"***.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam periode tahun 2019-2024 adalah meningkatkan infrastruktur wilayah yang mantap.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam

sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing yang tertuang dalam resntra tahun 2019-2024 perubahan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan							
		Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang mantap	71,45	76,34	80,09	82,12	83,78
		1.1 Meningkatkan infrastruktur sumber daya air yang mantap	Rasio ketersediaan jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) kewenangan kabupaten	58,86	60,10	61,33	62,57	63,80
		1.2 Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan yang mantap	Persentase ketersediaan jaringan drainase di jalan kewenangan kabupaten	58,42	61,42	61,79	62,15	62,52
			Proporsi panjang jaringan dalam kondisi mantap	81,11	82,50	84,00	85,50	87,50
			Proporsi jembatan dalam kondisi mantap	88,05	89,50	91,00	92,00	93,50
		1.3 Meningkatkan infrastruktur keciptakaryaan yang mantap	Cakupan akses layanan air minum	61,09	63,32	65,55	67,77	70,00
			Rasio ketersediaan sarpras persampahan	0,00	80,00	82,00	83,00	85,00
			Cakupan akses sanitasi/air limbah domestik	94,37	95,17	95,57	95,97	96,37
			Rasio bangunan negara yang sesuai standar teknis	76,88	78,00	79,12	80,24	81,36
			Rasio bangunan yang memiliki IMB	6,50	7,49	8,01	8,57	9,15
			Rasio bangunan dan lingkungan yang tertata	0,00	10,00	60,00	91,11	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2020	2021	2022	2023	2024	
		1.4	Meningkatnya jumlah penyedia jasa konstruksi yang kompetitif	Rasio tenaga konstruksi yang terlatih	0,00	60,00	80,00	80,00	80,00
		1.5	Meningkatnya manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Tingkat penyelesaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	100	100	100	100	100
		1.6	Meningkatnya kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan	Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00

2.2. Perencanaan Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Table 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	
1	Meningkatnya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap					
		1.1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang mantap	Rasio ketersediaan jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) kewenangan kabupaten	Persentase	61,33
		1.2	Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan yang mantap	Persentase ketersediaan jaringan drainase di jalan kewenangan kabupaten	Persentase	61,79
				Proporsi panjang jaringan jalan kondisi mantap	Persentase	84,00
				Proporsi jembatan dalam kondisi mantap	Persentase	91,00
		1.3	Meningkatnya infrastruktur keciptakarya yang mantap	Cakupan akses layanan air minum	Persentase	65,55
				Rasio ketersediaan sarpras persampahan	Persentase	82,00
				Cakupan akses sanitasi/air limbah domestik	Persentase	95,57



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	
			Rasio bangunan negara yang sesuai standar teknis	Persentase	79,12	
			Rasio bangunan yang memiliki IMB	Persentase	8,01	
			Rasio bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase	60,00	
		1.4	Meningkatnya jumlah penyedia jasa konstruksi yang kompetitif	Rasio tenaga konstruksi yang terlatih	Persentase	80,00
		1.5	Meningkatnya manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Tingkat penyelesaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Persentase	100,00
		1.6	Meningkatnya kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan	Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	Persentase	88,00

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja (PK)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal Tahun 2022

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang mantap	- Rasio ketersediaan jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) kewenangan kabupaten	Persentase	61,33
2	Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan yang mantap	- Persentase ketersediaan jaringan drainase di jalan kewenangan kabupaten - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap - Proporsi jembatan dalam kondisi mantap	Persentase Persentase Persentase	61,79 84,00 91,00
3	Meningkatnya infrastruktur keciptakarya yang mantap	- Cakupan akses layanan air minum - Rasio ketersediaan sarpras persampahan - Cakupan akses sanitasi/air limbah - Rasio bangunan negara yang sesuai standar teknis - Rasio bangunan yang memiliki IMB - Rasio bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase	65,55 82,00 95,57 79,12 8,01 60,00

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
4	Meningkatnya jumlah penyedia jasa konstruksi yang kompetitif	- Rasio tenaga konstruksi yang terlatih	Persentase	80,00
5	Meningkatnya manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	- Tingkat penyelesaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Persentase	100,00

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal Tahun 2022

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Tingkat penyelesaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	100 %	16.914.204.300
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	- Rasio ketersediaan jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) kewenangan Kabupaten	61,33 %	6.295.660.000
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	- Cakupan akses layanan air minum di Kabupaten/Kota	65,55 %	6.539.802.000
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	- Rasio Ketersediaan sarpras persampahan	82,00 %	2.551.699.500
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	- Cakupan akses sanitasi/air limbah domestik	95,57 %	2.348.607.200
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	- Persentase infrastruktur jaringan drainase di jalan kewenangan Kabupaten Tegal	61,79 %	18.770.000.000
7	Proram Penataan Bangunan Gedung	- Rasio bangunan negara yang sesuai standar teknis	79,12 %	29.559.000.000
		- Rasio bangunan yang memiliki IMB	8,01 %	
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	- Rasio bangunan dan lingkungan yang tertata	60,00 %	513.394.000
9	Program Penyelenggaraan Jalan	- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	84,00 %	117.372.560.000
		- Proporsi jembatan dalam kondisi mantap	91,00 %	
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	- Rasio tenaga konstruksi yang terlatih	60,00 %	1.500.000.000
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	- Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	88,00 %	1.008.195.000
Jumlah				203.373.122.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome* yaitu :

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Skala Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala integritas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

1.2. Analisis Capaian Kinerja

Pada sub ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal pada tahun 2022 sebagaimana hasil perhitungan data dan pengukuran di lapangan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal pada Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang mantap	80,09	82,36	102,83	Sangat Tinggi	
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang mantap	- Rasio ketersediaan jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) kewenangan Kabupaten	61,33 %	60,89 %	100	Sangat Tinggi	Simlabul
2	Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan yang mantap	- Persentase ketersediaan jaringan drainase di jalan kewenangan Kabupaten Tegal	61,79 %	64,41 %	103,8	Sangat Tinggi	Simlabul
		- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	84,00 %	84,57 %	100,68	Sangat Tinggi	Simlabul
		- Proporsi jembatan dalam kondisi mantap	91,00 %	91,09 %	100,10	Sangat Tinggi	Simlabul
4	Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan yang mantap	- Cakupan akses layanan air minum	65,55 %	67,77 %	103,39	Sangat Tinggi	Simlabul
		- Rasio ketersediaan sarpras persampahan	82,00 %	83,00 %	101,22	Sangat Tinggi	Simlabul
		- Cakupan akses sanitasi/air limbah domestik	95,57 %	95,97 %	100	Sangat Tinggi	Simlabul
		- Rasio bangunan negara yang sesuai standar teknis	79,12 %	79,12 %	100	Sangat Tinggi	Simlabul
		- Rasio bangunan yang memiliki IMB	8,01 %	7,34 %	91,64	Sangat Tinggi	Simlabul
		- Rasio bangunan dan lingkungan yang tertata	60,00 %	91,11 %	151,85	Sangat Tinggi	Simlabul
4	Meningkatnya jumlah penyedia jasa konstruksi yang kompetitif	- Rasio tenaga konstruksi yang terlatih	80,00 %	100 %	125	Sangat Rendah	Simlabul
5	Meningkatnya manajemen administrasi pelayanan	- Tingkat penyelesaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian,	100,00 %	100 %	100	Sangat Tinggi	Simlabul

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	perencanaan dan keuangan					
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan	- Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	88,00 %	89,00 %	101,14	Sangat Tinggi	Simlabul

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun) :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang mantap	71,45	--	--	76,34	--	--	80,09	82,36	102,83
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang mantap	- Rasio ketersediaan jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) kewenangan Kabupaten	66,40	58,86	88,64	60,10	60,27	100,28	61,33	60,89	100
2	Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan yang mantap	- Persentase ketersediaan jaringan drainase di jalan kewenangan Kabupaten Tegal	14,30	58,42	408,31	61,42	61,60	100,29	61,79	64,41	103,8
		- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	70,02	68,77	98,21	82,50	83,05	100,67	84,00	84,57	100,68
		- Proporsi jembatan dalam kondisi mantap	73,51	68,54	93,23	89,50	89,57	100,08	91,00	91,09	100,10



NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
3	Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan yang mantap	- Cakupan akses air minum							65,55	67,77	103,39
		- Rasio ketersediaan sarpras persampahan				80,00	50,06	62,57	82,00	83,00	101,22
		- Cakupan akses sanitasi/air limbah domestik				95,17	99,89	104,96	95,57	95,97	100
		- Rasio bangunan negara yang memiliki standar teknis							79,12	79,12	100
		- Rasio bangunan yang memiliki IMB							8,01	7,34	91,64
		- Rasio bangunan dan lingkungan yang tertata							60,00	91,11	151,85
4	Meningkatnya jumlah penyedia jasa konstruksi yang kompetitif	- Rasio tenaga konstruksi yang terlatih				60,00	91,25	152,08	80,00	100	125
5	Meningkatnya manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	- Tingkat penyelesaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan				100,00	94,69	94,69	100	100	100
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan	- Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan							88,00	89,00	101,14

c. Perbandingan realisasai kinerja sampai dengan tahun ini dengan target angka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.



Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal pada Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Target Akhir 2024	% Capaian	Tingkat Kemajuan
	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang mantap	--	82,36	83,78	102,83	
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang mantap	- Rasio ketersediaan jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) kewenangan Kabupaten	60,27 %	60,89 %	63,80 %	100	101,76 %
2	Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan yang mantap	- Persentase ketersediaan jaringan drainase di jalan kewenangan Kabupaten Tegal	61,60 %	64,41 %	62,52 %	103,8	104,07 %
		- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	83,05 %	84,57 %	87,50 %	100,68	101,83 %
		- Proporsi jembatan dalam kondisi mantap	89,57 %	91,09 %	93,50 %	100,10	100,02 %
3	Meningkatnya infrastruktur keciptakarya yang mantap	- Cakupan akses layanan air minum	63,32 %	67,77 %	70,00 %	103,39	107,03 %
		- Rasio ketersediaan sarpras persampahan	50,06 %	83,00 %	85,00 %	101,22	165,80 %
		- Cakupan akses sanitasi/air limbah domestik	99,89 %	95,97 %	96,37 %	100	95,68 %
		- Rasio bangunan negara yang sesuai standar teknis	78 %	79,12 %	81,36 %	100	101,44 %
		- Rasio bangunan yang memiliki IMB	7,49 %	7,34 %	9,15 %	91,64	98 %
		- Rasio bangunan dan lingkungan yang tertata	45 %	91,11 %	9,15 %	151,58	202,47 %
4	Meningkatnya jumlah penyedia jasa konstruksi yang kompetitif	- Rasio tenaga konstruksi yang terlatih	91,25 %	100 %	80,00 %	125	109,59 %
5	Meningkatnya manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	- Tingkat penyelesaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	94,69 %	100 %	100,00 %	100	105,61 %
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan	- Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	87 %	89,00 %	90,00 %	101,14	102,30 %



d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.5

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal pada Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang mantap	80,09	82,36	102,83		
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang mantap	- Rasio ketersediaan jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) kewenangan Kabupaten	61,33 %	60,89 %	100	Kecukupan Pagu Anggaran, Waktu dan Sumber Daya	
2	Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan yang mantap	- Persentase ketersediaan jaringan drainase di jalan kewenangan Kabupaten Tegal	61,79 %	64,41 %	103,8	Kecukupan Pagu Anggaran, Waktu dan Sumber Daya	
		- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	84,00 %	84,57 %	100,68	Kecukupan Pagu Anggaran, Waktu dan Sumber Daya	
		- Proporsi jembatan dalam kondisi mantap	91,00 %	91,09 %	100,10	Kecukupan Pagu Anggaran, Waktu dan Sumber Daya	
3	Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaannya yang mantap	- Cakupan akses layanan air minum	65,55 %	67,77 %	103,39	Kecukupan Pagu Anggaran, Waktu dan Sumber Daya	
		- Rasio ketersediaan sarpras persampahan	82,00 %	83,00 %	101,22	Kecukupan Pagu Anggaran, Waktu dan Sumber Daya	
		- Cakupan akses sanitasi/air limbah domestik	95,57 %	95,97 %	100	Kecukupan Pagu Anggaran, Waktu dan Sumber Daya	
		- Rasio bangunan negara yang sesuai standar teknis	79,12 %	79,12 %	100	Kecukupan Pagu Anggaran, Waktu dan Sumber Daya	
		- Rasio bangunan yang memiliki IMB	8,01 %	7,34 %	91,64	Kecukupan Pagu Anggaran, Waktu dan Sumber Daya	
		- Rasio bangunan dan lingkungan yang tertata	60,00 %	91,11 %	151,85	Kecukupan Pagu Anggaran, Waktu dan Sumber Daya	



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
4	Meningkatnya jumlah penyedia jasa konstruksi yang kompetitif	- Rasio tenaga konstruksi yang terlatih	80,00 %	100 %	125	Kecukupan Pagu Anggaran, Waktu dan Sumber Daya	
5	Meningkatnya manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	- Tingkat penyelesaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	100,00 %	100 %	100	Kecukupan Pagu Anggaran, Waktu dan Sumber Daya	
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan	- Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	88,00 %	89,00 %	101,14	Kecukupan Pagu Anggaran, Waktu dan Sumber Daya	

e. Analisis capaian terhadap sasaran (dibandingkan dengan tahun lalu).

- 1) Persentase ketersediaan jaringan drainase di jalan kewenangan Kabupaten diperoleh pencapaian 103,8 % dengan predikat sangat tinggi.
- 2) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap diperoleh pencapaian 100,68 % dengan predikat sangat tinggi.
- 3) Proporsi jembatan dalam kondisi mantap diperoleh pencapaian 100,10 % dengan predikat sangat tinggi.

Tabel 3.6

Perkembangan Kondisi Drainase, Jalan dan Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal tahun 2022

No	Kondisi Jalan, Drainase dan Jembatan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jalan	km					
	Baik	km	528,9	576,24	582,69	603,70	622,23
	Sedang	km	118,7	105,73	104,56	97,31	94,27
	Rusak Ringan	km	82,98	70,94	69,22	63,12	54,42
	Rusak Berat	km	116,8	94,355	90,81	83,14	76,36
	Jumlah Jalan	km	847,3	847,27	847,27	847,27	847,27
2.	Drainase	km					
	Jalan Kabupaten	km	847,27	847,27	847,27	847,27	847,27
	Jalan yang harus berdrainase	km	477,46	490,15	490,15	490,15	490,15



No	Kondisi Jalan, Drainase dan Jembatan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Jalan yang tidak harus berdrainase	km	169,45	160,79	160,79	55,19	42,90
	Jalan yang berdrainase	km	254,41	277,95	286,35	301,93	314,22
	% Jalan berdrainase (d/b)	persen	53,28	57,85	58,42	61,60	64,41
3.	Jembatan	buah					
	Baru	buah					
	Baik	buah	298	301	305	323	341
	Sedang	buah	93	91	88	89	78
	Rusak Ringan	buah	30	30	30	33	31
	Rusak Berat	buah	23	22	21	22	22
	Jumlah Jembatan	buah	444	444	444	460	460

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel 3.7
Analisis Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal pada Tahun 2022

NO	Tujuan/Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Rasio ketersediaan jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) kewenangan Kabupaten	61,33	60,89	100	6.295.660.000	6.095.480.000	96,82	1,03
2	Persentase ketersediaan jaringan drainase di jalan kewenangan Kabupaten Tegal	61,79	64,41	103,8	18.770.000.000	18.494.485.250	98,53	1,01
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	84,00	84,57	100,68	117.372.560.000	108.463.528.293	92,41	1,08
	Proporsi jembatan dalam kondisi mantap	91,00	91,09	100,10				
3	Cakupan akses layanan air minum	65,55	67,77	100,39	6.539.802.000	4.979.745.414	76,15	1,31
	Rasio ketersediaan sarpras persampahan	82,00	83,00	101,22	2.551.699.500	2.531.176.271	99,20	1,00
	Cakupan akses sanitasi/air limbah domestik	95,57	95,97	100	2.348.607.200	2.305.504.385	98,16	1,01
	Rasio bangunan negara yang sesuai standar teknis	79,12	79,12	100	29.559.000.000	24.506.063.499	82,91	12,06



NO	Tujuan/Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Rasio bangunan yang memiliki IMB	8,01	7,34	91,64				
	Rasio bangunan dan lingkungan yang tertata	60,00	91,11	151,85	513.394.000	425.956.126	82,97	1,20
4	Rasio tenaga konstruksi yang terlatih	80,00	100	125	1.500.000.000	1.401.339.717	93,42	1,07
5	Tingkat penyelesaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	100,00	100	100	16.914.204.300	15.810.173.889	93,47	1,06
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan	88,00	89,00	101,14	1.008.195.000	936.092.134	92,85	1,07

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.8

Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal pada Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang mantap	Persentase infrastruktur sumber daya air yang mantap	100	- Program pengelolaan sumber daya air yang (SDA)	Rasio ketersediaan jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) kewenangan Kabupaten	100	Menunjang
2	Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan yang mantap	Persentase infrastruktur kebinamargaan yang mantap	100,34	- Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase ketersediaan jaringan drainase di jalan kewenangan Kabupaten	103,8	Menunjang
				- Program penyelenggaraan jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	100,68	Menunjang



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
					Proporsi jembatan dalam kondisi mantap	100,10	Menunjang
3	Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan yang mantap	Persentase infrastruktur keciptakaryaan yang mantap		- Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Cakupan akses layanan air minum	103,39	Menunjang
				- Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Rasio ketersediaan sarpras persampahan	101,22	Menunjang
				- Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Cakupan akses sanitasi/ air limbah domestik	100	Menunjang
				- Program penataan bangunan gedung	Rasio bangunan negara yang sesuai standar teknis	100	Menunjang
					Rasio bangunan yang memiliki IMB	91,64	Menunjang
				- Program penataan bangunan dan lingkungannya	Rasio bangunan dan lingkungan yang tertata	151,85	Menunjang
4	Meningkatnya jumlah penyedia jasa konstruksi yang kompetitif	Persentase jumlah penyedia jasa konstruksi yang kompetitif	125	- Program pengembangan jasa konstruksi	Rasio tenaga konstruksi yang terlatih	125	Tidak Menunjang
5	Meningkatnya manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Persentase manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	100	- Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat penyelesaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	100	Menunjang



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan	Persentase kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan	101,14	- Program penyelenggaraan penataan ruang	Rasio kepatuhan terhadap ITR	101,14	Menunjang

1.3. Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal tahun 2022

Tabel 3.9
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.295.660.000	6.095.480.000	96,82
	Kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaen/Kota			
	- Sub kegiatan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	250.000.000	247.422.950	98,97
	- Sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	3.000.000.000	2.831.225.600	94,37
	- Sub kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	2.845.660.000	2.817.676.850	99,02
	- Sub kegiatan pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi	200.000.000	199.155.400	99,58
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	18.770.000.000	18.494.485.250	98,53
	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota			
	- Sub kegiatan pembangunan sistem drainase perkotaan	18.770.000.000	18.494.485.250	98,53
3	Program Penyelenggaraan Jalan	117.372.560.000	108.463.528.293	92,41
	Kegiatan penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota			
	- Sub kegiatan penyusunan rencana, kebijakan dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	1.380.000.000	1.342.034.000	97,25
	- Sub kegiatan pembangunan jalan	34.249.983.000	30.317.360.446	88,52
	- Sub kegiatan pelebaran jalan menuju standar	900.000.000	886.792.000	98,53
	- Sub kegiatan rekonstruksi jalan	15.290.000.000	14.930.928.800	97,65
	- Sub kegiatan berkala jalan	38.885.000.000	34.920.070.462	89,90
	- Sub kegiatan pemeliharaan rutin jalan	19.039.340.000	18.600.986.596	97,70
	- Sub kegiatan pembangunan jembatan	3.128.237.000	3.059.995.300	97,82
	- Sub kegiatan rehabilitasi jembatan	700.000.000	685.250.950	97,89
	- Sub kegiatan pemeliharaan rutin jembatan	3.800.000.000	3.720.109.739	97,90



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
4	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	6.539.802.000	4.979.745.414	76,15
	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota			
	- Sub kegiatan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	200.000.000	152.831.924	76,42
	- Sub kegiatan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	100.000.000	97.400.000	97,40
	- Sub kegiatan perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	5.103.597.500	3.818.013.500	74,81
	- Sub kegiatan perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	1.136.204.500	911.500.000	80,22
5	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	2.551.699.500	2.531.176.271	99,20
	Kegiatan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten/Kota			
	- Sub kegiatan pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2.551.699.500	2.531.176.271	99,20
6	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	2.348.607.2000	2.305.504.385	98,16
	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota			
	- Sub kegiatan rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	2.074.272.500	2.046.900.485	98,68
	- Sub kegiatan jasa penyedotan lumpur tinja	274.334.700	258.603.900	94,27
7	Program Penataan Bangunan Gedung	29.559.000.000	24.506.063.499	82,91
	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
	- Sub kegiatan penyelenggaraan penerbitan izin, mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi (SLF), peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG	240.000.000	95.200.617	39,67
	- Sub kegiatan perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah Kabupaten/Kota	29.069.000.000	24.253.561.112	83,43
	- Sub kegiatan penyusunan regulasi terkait bangunan gedung Kabupaten/Kota	75.000.000	57.296.860	76,40
	- Sub kegiatan bantuan teknis pembangunan gedung negara daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	64.211.410	64,21
	- Sub kegiatan penilikan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik bangunan	75.000.000	35.793.500	47,72
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	513.394.000	425.956.126	82,97
	Kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota			
	- Sub kegiatan penataan bangunan dan lingkungannya	513.394.000	425.959.126	82,97
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.500.000.000	1.401.339.717	93,42
	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	500.000.000	457.464.594	91,49



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	- Sub kegiatan penyiapan instruktur/asesor/penyelenggara pelatihan	50.000.000	36.165.908	72,33
	- Sub kegiatan pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi	350.000.000	329.938.686	94,27
	- Sub kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi	100.000.000	91.360.000	91,36
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	483.514.583	96,70
	- Sub kegiatan pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi	150.000.000	145.314.437	96,88
	- Sub kegiatan penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	150.000.000	146.484.019	97,66
	- Sub kegiatan penyusunan data dan informasi tenaga kerja dan badan usaha	100.000.000	94.840.000	94,84
	- Sub kegiatan penyusunan data dan informasi profil pekerjaan konstruksi	100.000.000	96.876.127	96,88
	Kegiatan Izin Usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	250.000.000	247.791.000	99,12
	- Sub kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi	200.000.000	198.176.000	99,09
	- Sub kegiatan pemantauan dan evaluasi IUJK nasional yang telah diterbitkan	50.000.000	49.615.000	99,23
	Kegiatan Pengawas Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	250.000.000	212.569.540	85,03
	- Sub kegiatan bimbingan teknis tentang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	200.000.000	184.844.540	92,42
	- Sub kegiatan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	50.000.000	27.725.000	55,45
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.914.204.300	15.810.173.889	93,47
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	266.116.000	249.326.372	93,69
	- Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	179.789.000	169.852.872	94,47
	- Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	86.327.000	79.473.500	92,06
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.683.050.700	9.987.767.019	93,49
	- Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	10.158.050.700	9.482.445.019	93,35
	- Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	156.000.000	155.820.000	99,88
	- Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	369.000.000	349.502.000	94,72
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	625.000.000	592.120.148	94,74
	- Sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	625.000.000	592.120.148	94,74
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000	192.622.497	96,31
	- Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	200.000.000	192.622.497	96,31



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	585.000.000	583.820.492	99,80
	- Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	400.000.000	399.367.992	99,84
	- Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.000.000	34.982.500	99,95
	- Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	150.000.000	149.470.000	99,65
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	333.200.600	332.300.0000	99,73
	- Sub kegiatan pengadaan mebel	123.200.600	122.800.000	99,67
	- Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	210.000.000	209.500.0000	99,76
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.346.837.000	1.117.540.060	82,98
	- Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	500.000.000	310.034.613	62,01
	- Sub penyediaan jasa pelayanan umum kantor	846.837.000	807.505.447	95,36
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.875.000.000	2.754.677.301	95,81
	- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	600.000.000	550.147.222	91,70
	- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	1.200.000.000	1.145.886.579	95,49
	- Sub kegiatan pemeliharaan mebel	25.000.000	24.925.000	99,70
	- Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	250.000.000	249.924.000	99,97
	- Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	800.000.000	783.767.500	97,97
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.008.195.000	936.092.134	92,85
	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			
	- Sub kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi, evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten/Kota	500.000.000	476.425.868	95,29
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
	- Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	200.000.000	185.932.567	92,97
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	308.195.000	273.733.699	88,82
	- Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	200.000.000	175.132.199	87,57
	- Sub kegiatan sistem informasi penataan ruang	108.195.000	98.601.500	91,13



NARASI LKjIP

3.4 Narasi LKjIP

Pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal berpedoman kepada Visi Misi Bupati Tegal, yang lebih menitik beratkan terhadap MISI II “Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan”. Tujuan atas Misi tersebut adalah Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan dengan sasaran Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap, salah satu indikator kinerja atas tujuan tersebut adalah Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang mantap.

Hasil capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal Tahun 2022 ditujukan untuk mengidentifikasi tingkat capaian dan kesesuaian antar output kegiatan dengan output Program mendasari Renstra yang sudah ditetapkan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal telah melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 11 Program dan 23 Kegiatan serta 61 Sub Kegiatan. Sesuai dengan tujuan, sasaran dan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2024 yang harus diwujudkan pada Tahun 2022.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal menurut DPA 2022 adalah sebesar Rp 203.373.122.000,00 (Dua ratus tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pagu anggaran penetapan pada program tersebut sebesar Rp 17.797.088.300,00 (Tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) pada akhir tahun anggaran terjadi penggeseran anggaran sehingga hanya sebesar Rp 16.914.204.300,00 (Enam belas milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus empat ribu tiga ratus rupiah) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 93,47% dan realisasi keuangan sebesar Rp 15.810.173.889,00 (Lima belas milyar delapan ratus

sepuluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah).

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air, pagu anggaran Program SDA adalah sebesar Rp 6.295.660.000,00 (Enam milyar dua ratus Sembilan lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), pagu tersebut tetap jumlahnya tidak mengalami perubahan pagu dengan target kinerja 61,33% berupa Rasio ketersediaan jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten/Kota. Mendasari capaian kinerja pada tahun 2021 dengan target kinerja 60,10% dan dicapai menjadi 60,27%, sedangkan capaian kinerja Program SDA pada tahun 2022 hanya tercapai menjadi 60,89%, maka persentase capaian kinerja Program SDA adalah 99,28% dengan predikat Sangat Baik meskipun target kinerja pada tahun 2022 tidak dapat tercapai, hal ini dikarenakan keterbatasan pagu anggaran program.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, pada tahun 2022 pagu anggaran program tersebut adalah sebesar Rp 6.539.802.000,00 (Enam milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu rupiah), realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun hanya tercapai sebesar 76,15% atau sebesar Rp 4.979.745.414,00 (Empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah). Peruntukan anggaran SPAM digunakan untuk pembangunan SPAM Perdesaan dengan hasil berupa terbangunnya sebuah Bak penampung Air Baku dengan kapasitas 5,06 M³ dan Panjang saluran/pipa terpasang sepanjang 300M dengan diameter pipa 90 mm. sumber dana program SPAM berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan untuk kegiatan perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan tercapai sebanyak 784 SR (sambungan rumah), dan untuk kawasan perdesaannya dicapai 218 SR atau hanya 62,29% dari target kinerja. Secara umum untuk program SPAM telah mencapai target kinerja SPM-nya yaitu sebesar 67,40% dari target 65,55% ditahun 2022.
4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 2.551.699.500,00 (Dua milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan sumber dana berasal dari dana DAK, sampai dengan akhir tahun anggaran terbangun TPS3R sebanyak 4 unit dengan realisasi keuangan mencapai 99,20%.
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.348.607.200,00 (Dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan target kinerja berupa pembangunan fasilitas air limbah domestik skala rumah tangga sejumlah 55 unit pada 6 (enam)



desa, sehingga total fasilitas terbangun sebanyak 330 unit. Pengerjaan fasilitas tersebut dilakukan secara swakelola oleh para Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada desa sasaran. Realisasi anggaran mencapai 98,16% dengan sumber dana berasal dari DAK. Target kinerja SPM pada program sanitasi adalah sebesar 95,57% dengan capaian kinerja 99,93%.

6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase. Target kinerja program tersebut adalah 61,79% berupa Persentase ketersediaan jaringan drainase di jalan kewenangan kabupaten. Pagu anggaran penetapan adalah sebesar Rp 18.770.000.000,00 (Delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah). Sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 tercapai pembangunan drainase sebesar 64,41% sedangkan target pada akhir RPJMD hanya sebesar 62,52%, sehingga persentase capaian kinerja program drainase mencapai 104,24% sedangkan realisasi anggaran mencapai 98,53%.
7. Program Penataan Bangunan Gedung, pagu anggaran program adalah sebesar Rp 29.559.000.000,00 dengan peruntukan guna pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP), Gedung Polsek Pangkah, Gedung Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Slawi, dan Gedung Satradar, kecuali Gedung MPP seluruh Gedung yang dibangun akan dihibahkan ke Instansi terkait. Capaian kinerja fisik mencapai 100% sedangkan target kinerja program berupa Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis sebesar 79,12% dan Rasio Bangunan yang Memiliki IMB sebesar 8,02% tercapai masing-masing 79,12% dan 7,34%.
8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp 16.000.000.000,00 (Enam belas milyar rupiah) dan pada perubahan anggaran hanya sebesar Rp 513.394.000,00 hal ini dikarenakan tidak terlaksananya kegiatan penataan koridor kota Slawi. Sedangkan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar Rp 425.956.126,00 atau sebesar 82,97%.
9. Program Penyelenggaraan Jalan, pada penetapan tahun anggaran 2022 program tersebut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 109.301.844.000,00 (Seratus sembilan milyar tiga ratus satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan pada perubahan anggaran menjadi Rp 117.372.560.000,00 (Seratus tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Target kinerja program adalah berupa Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 84,00% dan Proporsi jembatan dalam kondisi mantap sebesar 91,00%. Capaian kinerja program jalan mencapai 84,57% dan jembatan mencapai 91,09%,

sehingga secara keseluruhan persentase capaian kinerja program lebih dari 100%, sedangkan realisasi keuangan mencapai 92,41%.

10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi. Target kinerja program Jakon adalah Rasio Tenaga Konstruksi yang Terlatih sebesar 80,00% dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) persentase capaian kinerja sebesar 125% dengan realisasi anggaran mencapai 93,42%.
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.008.195.000,00 (Satu milyar delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan target kinerja berupa Rasio Kepatuhan terhadap ITR yang diajukan sebesar 88,00%, sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi anggaran sebesar Rp 936.092.134,00 (Sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) atau sebesar 92,85% sedangkan capaian kinerja program mencapai 89,00%.
12. Secara umum capaian kinerja atas indikator Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang mantap adalah sebesar 82,36% dari target 80,09%, sehingga persentase capaian sebesar 102,83% hal ini dikarenakan ketersediaan anggaran yang telah dialokasikan dan tata kelola kinerja yang dilakukan pada DPUPR Kab. Tegal

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja pada Bab III dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal dapat dikatakan "sangat tinggi". Ada 13 indikator dengan skala pengukuran capaian terdiri dari 12 indikator "sangat tinggi", 1 (satu) indikator "rendah". Diharapkan capaian program dan kegiatan ditahun mendatang akan mengantarkan tercapainya sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan.

4.2 Rekomendasi

Mendasari capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal Tahun 2022, maka strategi yang akan diterapkan dalam menjalankan program dan kegiatan pada Tahun yang akan datang adalah dengan mempertahankan kinerja serta memperhitungkan sumber daya yang ada dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dengan fokus terhadap indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal tertera pada RPJMD dan Renstra OPD.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Alamat : Jalan Cut Nyak Dien, Slawi – Kab. Tegal
Telp. (0283) 6197673 - Fax. (0283) 6197503

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. HERY SUHARTONO, M.M
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dra. UMI AZIZAH
Jabatan : Bupati Tegal
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Slawi, 2 November 2022

Pihak Kedua

BUPATI TEGAL,

Dra. UMI AZIZAH

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN TEGAL,

Ir. HERY SUHARTONO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19630615 199401 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. TEGAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	- Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum	100,00 %
2.	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air yang Mantap	- Rasio ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	61,33 %
3.	Meningkatnya Infrastruktur Kebinamargaan yang Mantap	- Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	84,00 %
		- Persentase Ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten	61,79 %
		- Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap	91,00 %
4.	Meningkatnya Infrastruktur Keciptakarya yang Mantap	- Cakupan Akses Layanan Air Minum	65,55 %
		- Rasio Ketersediaan Sarpras Persampahan	82,00 %
		- Cakupan Akses Sanitasi/Air Limbah Domestik	95,57 %
		- Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis	79,12 %
		- Rasio Bangunan yang Memiliki IMB	8,01 %
		- Rasio Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	60,00 %
5.	Meningkatnya Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompetitif	- Peserta Tenaga Konstruksi yang Terlatih	80,00%
6.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kesesuaian Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan	- Rasio Kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	88,00%

	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.914.204.300	APBD 100 %
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.295.660.000	APBD 100 %
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	18.770.000.000	APBD 100 %
4.	Program Penataan Bangunan Gedung	29.559.000.000	APBD 100 %
5.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	513.394.000	APBD 100 %
6.	Program Penyelenggaraan Jalan	117.372.560.000	APBD 100%
7.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.500.000.000	APBD 100 %
8.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.008.195.000	APBD 100 %
	Jumlah I	191.933.013.300	APBD 100 %
Terbilang : Seratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga belas ribu tiga ratus rupiah			
	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.539.802.000	DAK
2.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.551.699.500	DAK
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.348.607.200	DAK
	Jumlah II	11.440.108.700	DAK
Terbilang : Sebelas milyar empat ratus tempat puluh juta seratus delapan ribu tujuh ratus rupiah			
	Jumlah I+II	203.373.122.000	
Terbilang : Dua ratus tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu rupiah			

Slawi, 2 November 2022

Pihak Kedua

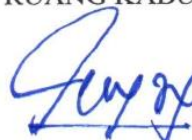
BUPATI TEGAL,



Dra. UMI AZIZAH

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN TEGAL,



Ir. HERY SUHARTONO, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19630615 199401 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal
- Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia
- Misi : Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
- Tujuan : 1. Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mantap.
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan di bidang jalan dan jembatan, bidang pbl-taru, bidang sumber daya air dan bidang jasa konstruksi
- Fungsi : 1. Penyusunan dan penetapan perencanaan Dinas;
 2. Perumusan kebijakan umum dan Teknis operasional di bidang jalan dan jembatan, bidang pbl-taru, bidang sumber daya air dan bidang jasa konstruksi;
 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pekerjaan umum;
 4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
 5. Pembinaan terhadap UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan penataan bangunan Wilayah I- VI;
 6. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan dinas;
 7. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum.

No.	Sasaran RPJMD/Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang mantap	Rasio ketersediaan jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) kewenangan Kabupaten	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten dikali seratus persen	Laporan hasil kegiatan	Kepala Bidang Sumber Daya Air
2	Meningkatnya infastruktur kebinamargaan yang mantap	Persentase ketersediaan jaringan drainase di jalan kewenangan Kabupaten	Panjang jalan yang memiliki drainase (km) dibagi panjang seluruh jalan kabupaten (km) dikali seratur persen	Laporan hasil kegiatan	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi panjang seluruh jalan kabupaten didaerah tersebut di kali seratur persen		
		Proporsi jembatan dalam kondisi mantap	Jembatan kondisi baik dibagi jembatan seluruhnya		
3	Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan yang mantap	Cakupan akses layanan air minum	Jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum dibagi total jumlah rumah di	Laporan hasil kegiatan	Kepala Bidang PBL-Taru

No.	Sasaran RPJMD/Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			kabupaten/kota dikali seratus persen		
		Rasio ketersediaan sarpras persampahan			
		Cakupan akses sanitasi/air limbah domestik	Jumlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah dibagi total jumlah rumah di kabupaten/kota dikali seratus persen		
		Rasio bangunan negara yang sesuai standar teknis			
		Rasio bangunan yang memiliki IMB			
		Rasio bangunan dan lingkungan yang tertata			
4	Meningkatnya jumlah penyedia jasa konstruksi yang kompetitif	Rasio tenaga konstruksi yang terlatih	Dihitung berdasarkan kemampuan memfasilitasi pelaksanaan pelatihan tenaga terampil dibanding dengan jumlah peminat keseluruhan	Laporan hasil kegiatan	Kepala Bidang Jasa Konstruksi
5	Meningkatnya manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kegiatan yang terlaksana dibagi jumlah kegiatan perangkat daerah dikali seratus persen	Laporan hasil kegiatan	Sekretaris Dinas
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan	Rasio kepatuhan ITR yang diajukan		Laporan hasil kegiatan	Kepala Bidang PBL-Taru

IKI Sekretariat

No.	Sasaran RPJMD/Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah tepat waktu dibanding jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat	Laporan hasil kegiatan	Sekretaris Dinas

No.	Sasaran RPJMD/Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			daerah dikali seratus persen		
		Persentase tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan SKPD dibanding jumlah kegiatan penatausahaan SKPD dikali setatur persen		
		Persentase tercapainya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dibanding jumlah kegiatan administrasi barang milik daerah dikali seratus persen		
		Persentase tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dibanding jumlah kegiatan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah dikali seratur persen		
		Persentase tercapainya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah dibanding jumlah kegiatan penyediaan administrasi umum perangkat daerah dikali seratus persen		
		Proporsi tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pelaksanaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dibanding jumlah kegiatan penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dikali seratur persen		
		Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dibanding jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan		

No.	Sasaran RPJMD/Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			pemerintah daerah dikali seratur persen		
		Persentase tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dibanding jumlah kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dikali seratus persern		

IKI Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran RPJMD/Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Tercapainya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase terpenuhinya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah pelaksanaan kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dibanding jumlah kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dikali seratus persen	Dokumen kepegawaian	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian
2	Tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibanding jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara dikali seratus persen	Dokumen kepegawaian	
		Persentase pendataan dan pengolahan administrasi kepegawian yang dilaksanakan tepat waktu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawian yang terpenuhi tepat waktu dibanding jumlah kegiatan penyediaan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawian dikali seratus persen		
		Persentase tercapainya monitoring, evaluasi dan	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		

No.	Sasaran RPJMD/Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		penilaian kinerja pegawai	dibanding jumlah kegiatan penyediaan kegiatan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dikali seratus persen		
		Persentase jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan study banding	Jumlah pelaksanaan keg peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dibanding jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dikali 100 %	Dokumen kepegawaian	
3	Tercapainya administrasi umum perangkat daerah	Persentase tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi tepat waktu dibanding jumlah logistik kantor dikali seratus persen	Dokumen kepegawaian	
		Persentase tersedianya cetakan dan penggandaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan cetakan dan penggandaan dibanding jumlah kegiatan penyediaan cetakan dan penggandaan dikali seratus persen		
		Persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan dibanding jumlah kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dikali seratus persen		
4	Tercapainya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan meubeler dinas	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyediaan meubeler dinas dibanding jumlah kegiatan penyediaan meubeler dinas dikali seratus persen	Dokumen kepegawaian	
		Proporsi tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pelaksanaan kegiatan peralatan dan mesin lainnya dibanding jumlah kegiatan penyediaan peralatan dan mesin lainnya dikali seratus persen		
5	Tercapainya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa komunikasi,	Jumlah pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, sumber	Dokumen kepegawaian	

No.	Sasaran RPJMD/Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		sumber daya air dan listrik	daya air dan listrik dibanding jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dikali seratus persen		
		Persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor DPUPR	Jumlah pelaksanaan kegiatan jasa pelayanan umum kantor dibanding jumlah kegiatan penyediaan pelayanan umum kantor dikali seratus persen		
6	Tercapainya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase cakupan kendaraan dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dalam kondisi baik dibanding jumlah kendaraan keseluruhan dikali seratus persen	Dokumen kepegawaian	
		Persentase pengelolaan alat berat dan laboratorium	Jumlah alat berat dan laboratorium dibanding jumlah alat berat dan laboratorium keseluruhan dikali seratus persen		
		Persentase cakupan mebel dalam kondisi baik	Jumlah mebel dalam kondisi baik dibanding mebel seluruhnya dikali seratus persen		
		Persentase cakupan peralatan dan mesin dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan mesin dalam kondisi baik dibanding cakupan peralatan dan mesin seluruhnya dikali seratus persen		
		Persentase cakupan gedung dalam kondisi baik	Jumlah gedung dalam kondisi baik dibanding jumlah gedung keseluruhannya dikali seratus persen		

IKI Kasubbag Keuangan

No.	Sasaran RPJMD/Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan SKPD dibanding jumlah kegiatan penatausahaan keuangan SKPD dikali seratus persen	Dokumen Keuangan	Ka Sub Bag Keuangan

No.	Sasaran RPJMD/Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Persentase terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD dibanding jumlah kegiatan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD dikali seratus persen		

IKI Kabid Jalan Dan Jembatan

No.	Sasaran RPJMD/Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan yang mantap	Persentase infrastruktur jaringan drainase di jalan kewenangan Kabupaten Tegal	Panjang jalan yang memiliki drainase (Km) dibagi panjang seluruh jalan kabupaten (Km) dikali seratus persen	Data Lokasi	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
		Proporsi panjang jaringan dalam kondisi yang mantap	Panjang jalan kondisi baik dibagi panjang jalan seluruhnya	Data Lokasi	
		Proporsi jembatan dalam kondisi yang mantap	Jembatan kondisi baik dibagi jembatan seluruhnya	Data Lokasi	

IKI Kabid Sumber Daya Air (SDA)

No.	Sasaran RPJMD/Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang mantap	Rasio ketersediaan jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) kewenangan kabupaten	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten dikali seratus persen		Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA)

IKI Kabid Jasa Konstruksi

No.	Sasaran RPJMD/Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya jumlah penyedia jasa konstruksi yang kompetitif	Rasio tenaga konstruksi yang terlatih	Dihitung berdasarkan kemampuan memfasilitasi pelaksanaan pelatihan tenaga trampil dibanding dengan jumlah peminat keseluruhan		Kepala Bidang Jasa Konstruksi

KI Kabid PBL-Taru

No.	Sasaran RPJMD/Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan yang mantap	Cakupan akses layanan air minum	Jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum dibagi total jumlah rumah di kabupaten/kota dikali seratus persen		Kepala Bidang PBL-Taru
		Rasio ketersediaan sarpras persampahan			
		Cakupan akses sanitasi/air limbah domestik	Jumlah rumah yang sudah terlayani akses ail limbah dibagi total jumlah rumah di kabupaten/kota dikali seratus persen		
		Rasio bangunan negara yang sesuai standar teknis			
		Rasio bangunan yang memiliki IMB			
		Rasio bangunan dan lingkungan yang tertata			
2	Meningkatnya kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan	Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan			